



**Judul** : Hentikan Bicara Pemindahan Ibukota - Dinilai Tidak Realistis, Mending Urus Masalah Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi  
**Tanggal** : Kamis, 14 Desember 2017  
**Surat Kabar** : Indo Pos  
**Halaman** : 1-7

# Hentikan Bicara Pemindahan Ibukota

*Dinilai Tidak Realistis, Mending Urus Masalah Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi*



JAKARTA-DPR RI sudah tidak ingin melakukan pembahasan soal wacana pemindahan Ibukota Negara dari Jakarta ke Palangkaraya. Pasalnya, rencana yang diinisiasi oleh pemerintah itu dinilai tidak realistis. Terlebih, hal tersebut membutuhkan anggaran yang sangat besar. "Sudah tidak akan dibahas. DPR telah bersikap," ungkap Achmad Hafisz Tohir, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI saat dihubungi, Rabu (13/12).

Komisi XI DPR RI juga, sambung politisi Partai amanat nasional (PAN) itu, meminta pemerintah untuk meredakan isu pembentukan pusat administrasi baru tersebut. Bahkan, pihaknya pun telah menolak pengajuan anggaran tambahan sebesar Rp7 miliar pada Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), guna melakukan kajian rencana tersebut. Dia menilai, rencana ini tak realistis

untuk dikejar oleh pemerintah dalam waktu dekat. Pasalnya, rencana itu dinilai lainya tak memiliki urgensi. Pemerintah, seharusnya lebih fokus pada pengendalian kemiskinan dan mempersempit ketimpangan ekonomi.

"Apa urgensinya? Kalau dibandingkan dengan persoalan yang dihadapi rakyat saat ini, itu jauh lebih penting untuk mengentas kemiskinan," tuturnya.

► *Baca Hentikan...Hal 7*



Apa urgensinya? Kalau dibandingkan dengan persoalan yang dihadapi rakyat saat ini, itu jauh lebih penting untuk mengentas kemiskinan"

**ACHMAD HAFISZ TOHIR**

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI

# Hentikan Bicara Pemindahan Ibukota

*Sambungan dari hal 1*

Menurutnya, angka kemiskinan yang meningkat dan sejumlah masalah lainnya, seperti penarikan subsidi tarif listrik lebih penting untuk diperhatikan pemerintah. Di sisi lain, rencana pemindahan ibu kota juga belum matang. Pemerintah pun diharapkan tak menggembor-gemborkan rencana tersebut.

"Saya setuju saja ibu kota lebih baik lagi. Tapi apa hari ini harus dipindahkan? Makanya, kami sampaikan, itu dikaji dulu saja. Kalau memang mau pemerintah buat kajian ya suruh saja swasta," pungkasnya.

Selain itu, menurutnya, secara siklus kepemimpinan seorang presiden, hal itu tak perlu dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di tahun ketiganya menjabat. Pasalnya, tahun ketiga merupakan tahun yang penuh gejolak.

Senada dengan Hafisz, Anggota Komisi XI DPR RI, Refrizal meminta pemerintah sudah tidak usah menggaungkan

kembali wacana pemindahan ibu kota. "Lebih baik polemiknya kita stop, itu buang energi bangsa dan negara. Distop saja, sehingga konsentrasi ke hal yang lain," tukasnya kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, kemarin.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengaku, pemerintah tak memiliki anggaran untuk pemindahan ibukota. Dalam rapat kerja antara pemerintah dan Komisi XI beberapa waktu lalu, DPR hanya menyepakati pemangkasan anggaran PPN/Bappenas Rp1,8 miliar menjadi Rp1,36 triliun. Pemangkasan itu berasal dari efisiensi (self blocking) sebesar Rp49,2 miliar dan tambahan dana hibah dan SBSN Rp 47,3 miliar.

Sementara, anggota Komisi XI DPR lainnya, Hendrawan Supraktikno menyatakan, rencana tersebut memang tak bisa dilakukan karena kajian masih belum rampung. Namun, ia mendukung kajian tersebut tetap berjalan tanpa perlu di-besar-besarkan. (aen)